



**PIDATO
PENYAMPAIAN JAWABAN
GUBERNUR DKI JAKARTA
ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Oleh :

**Heru Budi Hartono
Pj. Gubernur DKI Jakarta**

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Senin, 29 Juli 2024**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam kebajikan.

- Yth. - Saudara Ketua dan Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, atau yang mewakili;
 - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - Hadirin yang saya hormati.

*Alhamdulillah, Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat, rahmat dan ridho-Nya hari ini kita dapat hadir pada acara **Rapat Paripurna** dalam rangka **Penyampaian Penjelasan Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.***

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang saya banggakan,

Mengawali pidato ini, saya bersama jajaran Eksekutif mengucapkan terima kasih atas pendapat, saran dan pertanyaan yang disampaikan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta, terhadap materi *Rancangan Peraturan Daerah* tentang P2APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023. Ini merupakan wujud tanggung jawab bersama dalam upaya **akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.**

Eksekutif berupaya menanggapi seluruh pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi secara lengkap dan menyeluruh. Namun, mengingat banyaknya pertanyaan, saran, dan pendapat yang disampaikan, perkenankan saya untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat strategis. Untuk materi yang bersifat teknis dan memerlukan pembahasan lebih lanjut, kiranya dapat dibahas pada Rapat Kerja Komisi bersama Eksekutif.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Pada bagian pertama, Eksekutif mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD terhadap perolehan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023. Capaian ini merupakan wujud komitmen eksekutif untuk terus mempertahankan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

- Menanggapi pertanyaan dan saran **Fraksi Partai Nasdem** dan **Fraksi PSI mengenai tindak lanjut atas LHP BPK RI**, Eksekutif akan terus meningkatkan percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI. Hingga tanggal 31 Desember 2023, capaian penyelesaian tindak lanjut telah mencapai 90,02 persen dengan total 10.189 rekomendasi, dimana melampaui rata-rata capaian nasional sebesar 78,20 persen.
- Terima kasih atas dukungan **Fraksi Partai Nasdem** terkait peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Saat ini, SPIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menduduki peringkat tertinggi nasional berdasarkan penilaian BPKP, dengan skor SPIP sebesar 3,75. Indeks Manajemen Risiko (MR) sebesar 3,4 dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 3,27. Eksekutif terus berkomitmen meningkatkan tata kelola pemerintahan dan SPIP, dengan mengupayakan peningkatan perolehan pendapatan melalui optimalisasi berbagai sumber, seperti kerja sama pengelolaan aset.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya, saya akan menyampaikan tanggapan terhadap pertanyaan, saran, dan pendapat **Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat** terkait *Laporan Realisasi Anggaran* yang meliputi *Pendapatan Daerah, Belanja Daerah* dan *Pembiayaan Daerah*.

- Menanggapi evaluasi dari **Fraksi PDI Perjuangan** mengenai faktor-faktor penyebab penurunan anggaran, dapat dijelaskan bahwa Total APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar 5 triliun rupiah dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2023 yang sebesar 83,79 triliun rupiah. Penurunan ini disebabkan penyesuaian terhadap capaian target pendapatan dan alokasi anggaran belanja yang lebih realistis.

Penyesuaian target pendapatan dilakukan karena target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun-tahun sebelumnya sangat tinggi namun tidak tercapai.

Sementara itu, alokasi anggaran belanja diarahkan pada pemenuhan belanja prioritas yang berkesinambungan dengan implementasi program prioritas, yaitu mengedepankan pembangunan infrastruktur dan layanan perkotaan seperti penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, penanganan sampah, pertumbuhan ekonomi dan sektor usaha, serta pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon.

Prioritas belanja juga difokuskan pada pemberian bantuan dalam bentuk subsidi pelayanan publik, bantuan sosial, serta bantuan keuangan bagi Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka kerja sama antar daerah.

- Eksekutif mengucapkan **terima kasih atas apresiasi dari seluruh Fraksi terhadap pencapaian target realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023**, yaitu sebesar 100,57 persen, dengan capaian Pendapatan Asli Daerah sebesar 101,44 persen. Dari sisi realisasi Pendapatan Pajak, terdapat peningkatan nilai realisasi pada tahun 2023, yaitu sebesar 3,4 triliun rupiah atau naik 8,05 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2022.

- Menanggapi saran dari **Fraksi PKS** dan **Fraksi Partai Golkar** mengenai peluang peningkatan target pajak melalui kebijakan *Fiscal Cadaster* dan penerapan sistem *online* secara *real-time*, penetapan target penerimaan pajak Tahun Anggaran 2023 telah memperhitungkan hasil kegiatan *Fiscal Cadaster* yang dilakukan melalui sensus pajak daerah pada tahun 2022. *Online system* telah diterapkan untuk pembayaran, pelaporan, serta pelayanan terkait pajak dan retribusi. Harapannya, kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dapat meningkat, yang akan berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Menanggapi pendapat **Fraksi Partai Demokrat** mengenai perbaikan perencanaan penerimaan pajak daerah, Eksekutif terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, baik melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak daerah serta pengembangan digitalisasi pelayanan untuk kemudahan masyarakat.

- Menanggapi pertanyaan dari **Fraksi Partai Demokrat** dan **Fraksi PKS** tentang kurang optimalnya realisasi pendapatan retribusi, dapat saya jelaskan bahwa target Pendapatan Retribusi dalam APBD 2023 ditetapkan dengan optimis. Namun, dampak pandemi COVID-19 menyebabkan perlunya penyesuaian pemberian keringanan Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2023, dan mulai berlaku pada 14 November 2023. Kebijakan ini bertujuan membantu masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak pandemi, tetapi mengakibatkan target pendapatan retribusi tidak tercapai secara maksimal.

Terkait rendahnya realisasi pendapatan dari retribusi perizinan tertentu, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya beberapa perizinan yang tidak dapat diberikan karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; terdapat penurunan jumlah pengajuan pelayanan retribusi; dan adanya perbedaan tarif retribusi dengan pemerintah pusat.

- Menanggapi pertanyaan dari **Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PSI** mengenai rendahnya realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, terutama capaian Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah, dan penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Tahun Anggaran 2023, Eksekutif menyampaikan bahwa rendahnya pendapatan denda pajak karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan stimulus kepada masyarakat berupa penghapusan sanksi administrasi untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- Terkait penerimaan hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang belum optimal, disebabkan kurangnya minat calon pemanfaat BMD dan pengaruh daya beli masyarakat. Selain itu, penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan yang kurang optimal, disebabkan oleh beberapa kasus kerugian lama yang masuk dalam kategori macet, sehingga kecil kemungkinan untuk dapat ditagih.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya, terkait dengan *Belanja Daerah*, dapat saya jelaskan sebagai berikut:

- Menanggapi pendapat, pertanyaan, dan saran dari semua Fraksi mengenai realisasi Belanja Daerah, Eksekutif berkomitmen untuk mengoptimalkan pencapaian realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 demi kesejahteraan masyarakat Jakarta.
- Menanggapi pertanyaan **Fraksi PKS** terkait realisasi Belanja Pegawai yang hanya sebesar 95,74 persen, disampaikan bahwa pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) telah disesuaikan dengan capaian penilaian kinerja dari masing-masing pegawai.
- Terkait pelayanan pangan bersubsidi bagi penerima KJP, Eksekutif berupaya memastikan ketersediaan stok pangan bersubsidi berkualitas di semua lokasi dalam jumlah yang cukup. Pelayanan pangan bersubsidi juga telah menggunakan mekanisme pendaftaran *online* melalui aplikasi untuk pengendalian dan pengawasan pelayanan pangan bersubsidi.

- Menanggapi saran **Fraksi PKS** dan **Fraksi Partai Demokrat** terkait subsidi dalam bidang transportasi, Eksekutif memastikan bahwa *Public Service Obligation* (PSO) diberikan secara tepat sasaran, efisien, dan akuntabel, serta mengutamakan optimalisasi pelayanan kepada penumpang. Kinerja pelayanan PT Transjakarta pada tahun 2023 mengalami peningkatan dalam hal jumlah penumpang, revitalisasi halte, penambahan jumlah rute dan armada, serta optimalisasi integrasi antar armada.
- Menanggapi pertanyaan, saran dan pendapat dari **Fraksi PKS, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi PSI** terkait pendataan dan layanan program bantuan sosial KJP Plus dan KJMU, Eksekutif telah melakukan verifikasi terhadap pendaftar KJP Plus dan KJMU berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pada tahap pertama Tahun 2023, bantuan KJP Plus telah disalurkan kepada 674.599 penerima dan bantuan KJMU kepada 15.153 penerima. Sedangkan pada Tahap Kedua Tahun 2023, bantuan KJP Plus telah disalurkan kepada 656.390 penerima dan bantuan KJMU kepada 19.042 penerima.

Untuk mempermudah layanan KJP Plus dan KJMU, Eksekutif telah menyediakan posko/*helpdesk* pelayanan KJP Plus dan KJMU di tingkat kota administrasi.

- Menanggapi pertanyaan dan saran dari **Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi Partai Gerindra** mengenai realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2023, disampaikan bahwa realisasi Belanja Modal sebesar 8,85 triliun rupiah atau 81,63 persen dari total anggaran sebesar 10,85 triliun rupiah. Terkait dengan Belanja Modal Tanah, Eksekutif akan terus melakukan perbaikan, sinkronisasi, sinergi, dan komunikasi dengan BPN serta masyarakat yang memiliki objek tanah terdampak.
- Menanggapi pertanyaan dari **Fraksi Partai Gerindra** terkait kurangnya bangunan sekolah pada jenjang SMP, SMA, dan SMK di DKI Jakarta,

Eksekutif telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Melakukan pemetaan sekolah di semua wilayah di Jakarta;
 2. Melakukan *re-grouping* terhadap sekolah, terutama jenjang SD yang berada pada satu kawasan;
 3. Mengalihfungsikan sekolah yang sudah di-*re-grouping* menjadi sekolah dengan jenjang tertentu yang belum ada di lokasi tersebut;
 4. Melakukan rehabilitasi total sekaligus menambah ruang kelas;
 5. Mengintegrasikan beberapa jenjang pendidikan pada satu kawasan.
- Menanggapi pertanyaan dari **Fraksi Partai Demokrat** dan **Fraksi PSI** terkait Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Eksekutif berkomitmen mengoptimalkan realisasi belanja dengan tetap memperhatikan prosedur pengadaan barang/jasa yang akuntabel, mengedepankan unsur kehati-hatian, serta memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya, saya akan menyampaikan tanggapan terkait *Pembiayaan Daerah*.

- Menanggapi pertanyaan dan saran **Fraksi PKS** dan **Fraksi Partai Demokrat** mengenai pencairan Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada BUMD, Eksekutif secara berkala telah melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan penggunaan PMD dapat diserap dan diimplementasikan sesuai dengan rencana.

Anggaran PMD yang tidak terealisasi optimal disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pengalihan pembiayaan proyek menggunakan *blending financing* pada PAM Jaya, proses persetujuan Kemendagri yang belum selesai terkait Perda tentang PT JIEP dan pergeseran pekerjaan proyek MRT.

Mengenai saran pengembalian PMD yang belum terserap, optimalisasi pengelolaan aset BUMD, sinergitas BUMD, serta evaluasi rencana bisnis dan kinerja BUMD, Eksekutif akan menindaklanjuti dengan serius untuk memastikan pengelolaan yang lebih baik dan efisien.

- Menanggapi pertanyaan dari **Fraksi PAN** dan **Fraksi PDI Perjuangan** mengenai nilai SiLPA pada Tahun Anggaran 2023, dapat disampaikan bahwa nilai SiLPA Tahun Anggaran 2023 sebesar 6,54 triliun rupiah, lebih rendah dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 yang sebesar 8,6 triliun rupiah. SiLPA pada Tahun Anggaran 2023 berasal dari pelampauan target pendapatan dan efisiensi belanja. Secara umum, seluruh program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2023 terlaksana dengan baik, sesuai target dan indikator yang telah ditetapkan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah. SiLPA Tahun Anggaran 2023 tersebut telah dialokasikan dalam program kegiatan APBD Tahun 2024, terutama untuk membiayai kegiatan yang belum diselesaikan pada tahun 2023.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang saya hormati.

Berikutnya, saya akan menyampaikan tanggapan atas pandangan umum yang berkaitan dengan *Neraca*.

- Menanggapi komentar **Fraksi Partai Golkar** mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH), Eksekutif terus berkomitmen melakukan pembangunan, penataan lahan, dan penanaman pohon, serta melakukan penataan integrasi hijau pada aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Menanggapi pertanyaan **Fraksi PAN** mengenai pengelolaan Rusunawa Marunda, Eksekutif telah melakukan pemeliharaan dan perbaikan secara rutin maupun berkala. Upaya pengamanan juga telah dilakukan sesuai dengan peraturan penatausahaan Barang Milik Daerah.
- Terkait Kampung Susun Bayam, sebagaimana saran **Fraksi PSI**, disampaikan bahwa saat ini warga Kampung Bayam memperoleh fasilitas hunian yang dilengkapi dengan akses listrik dan air. Berbagai fasilitas pendampingan dan pemberdayaan warga juga diberikan melalui program pelatihan persiapan tenaga kerja, pelatihan dan pendampingan *urban farming*, serta kesempatan menjadi tenaga kerja di berbagai *venue* yang dikelola oleh PT Jakarta Propertindo.

- Menanggapi pendapat **Fraksi Partai Golkar** mengenai Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), saat ini terdapat 324 RPTRA yang telah dibangun di Jakarta. Pemeliharaan atas prasarana dan sarana RPTRA telah diupayakan secara maksimal, baik melalui dana APBD maupun sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- Menanggapi pertanyaan dari **Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi PSI** mengenai Aset Fasos Fasum, disampaikan bahwa optimalisasi pelaksanaan penagihan kewajiban telah dilaksanakan secara intensif melalui pengawasan dan pengendalian penyerahan kewajiban fasos fasum. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga bekerja sama dengan Kejaksaan serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam optimalisasi penagihan kewajiban fasos fasum.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang saya hormati.

Pada bagian akhir, saya akan menyampaikan tanggapan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan program/kegiatan Eksekutif.

- Menanggapi pertanyaan, saran dan komentar dari **Fraksi PAN, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB-PPP, dan Fraksi Partai Nasdem** mengenai program pendidikan gratis pada sekolah swasta, Eksekutif sedang melakukan kajian kebutuhan anggaran untuk implementasi penyelenggaraan pendidikan gratis hingga pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri dan swasta. Terkait bantuan penebusan ijazah di sekolah swasta, telah diberikan bantuan melalui dana hibah Yayasan Beasiswa Jakarta (YBJ).
- Menanggapi pertanyaan **Fraksi PKS, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi PSI** terkait kualitas udara, Eksekutif telah melakukan berbagai upaya, diantaranya pembentukan Tim Kerja Mitigasi dan Adaptasi Belanja Iklim (MABI), peningkatan layanan transportasi umum, konversi bus Transjakarta ke bus listrik,

uji emisi kendaraan bermotor, serta pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menghasilkan emisi gas buang.

- Terkait layanan air bersih, sebagaimana pertanyaan dan saran dari **Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB-PPP, dan Fraksi PDI Perjuangan**, Eksekutif terus mendorong PAM Jaya melakukan pengembangan pelayanan air bersih dengan tujuan mencapai target 100% cakupan layanan pada tahun 2030.
- Menanggapi pertanyaan **Fraksi PAN** terkait kinerja PT Jakarta Propertindo dan Sarana Jaya, Eksekutif terus mendorong penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada BUMD.
- Menanggapi saran **Fraksi PAN** mengenai upaya peningkatan keselarasan aspek penyelenggaraan pendidikan vokasi antara SMK dengan dunia kerja dalam mengurangi pengangguran, Eksekutif telah melakukan beberapa langkah, antara lain melakukan *link and match* antara pembelajaran di SMK dengan kebutuhan dunia usaha dan industri; melakukan evaluasi pelatihan kerja; serta membangun sinergi antara pusat pelatihan kerja dengan dunia usaha.

- Menjawab pertanyaan dan pendapat **Fraksi PKS** mengenai belum optimalnya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Eksekutif telah berkoordinasi dengan BPN untuk mengatasi kendala dalam proses PTSL guna mengoptimalkan pensertifikatan tanah.
- Terkait pertanyaan **Fraksi PKS** dan **Fraksi PSI** mengenai layanan JakWifi, Eksekutif berkomitmen menyediakan layanan internet gratis melalui JakWifi yang efektif dan tepat sasaran. Penyesuaian titik lokasi JakWifi telah dilakukan berdasarkan hasil survei penggunaan JakWifi. Hingga saat ini, fasilitas JakWifi tetap tersedia di setiap taman, RW, dan RPTRA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan BPKP juga telah melakukan audit dalam rangka memastikan kualitas layanan dan ketepatan sasaran penggunaan JakWifi.
- Menanggapi pertanyaan **Fraksi Partai Demokrat** dan **Fraksi PDI Perjuangan** mengenai pengelolaan sampah, dapat disampaikan bahwa progres pekerjaan RDF di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara telah meliputi detail desain fasilitas utama pengolahan sampah dan sarana pendukung, konstruksi hanggar utama, serta

pabrikasi mesin-mesin pengolahan sampah. Selain itu, pembangunan infrastruktur pengolahan sampah berupa TPS 3R juga telah dilakukan untuk mendekatkan fasilitas pengolahan sampah dengan sumbernya dan telah terbangun di 12 lokasi.

- Menanggapi saran dan pendapat **Fraksi Partai Demokrat**, dan **Fraksi Partai Nasdem** mengenai Penanganan Kemiskinan Ekstrem, Eksekutif telah menyiapkan data sasaran terpadu sebagai acuan bagi lintas sektor dalam pelaksanaan intervensi program. Intervensi program diselenggarakan secara holistik melalui konvergensi 3 (tiga) strategi utama Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yaitu mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat, serta mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan.
- Terkait evaluasi atas kebijakan Bantuan Iuran BPJS Kesehatan, sebagaimana saran **Fraksi PKS**, disampaikan bahwa Eksekutif telah meningkatkan keandalan data penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan melalui kesesuaian dengan kriteria kelayakan penerima bantuan sosial.

- Menanggapi saran **Fraksi Partai Demokrat** mengenai nilai kemanfaatan pemberian hibah kepada Instansi Vertikal, Eksekutif telah memastikan bahwa pemberian hibah dilakukan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang terdapat dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tata cara pemberian hibah dan pengendaliannya telah diatur melalui sistem elektronik *e-hibah*.
- Untuk revitalisasi pasar tradisional, sebagaimana saran dari **Fraksi Partai Demokrat**, beberapa pasar tradisional telah dibangun dan akan dilanjutkan revitalisasi secara bertahap melalui Perumda Pasar Jaya. Konsep pembangunan dan revitalisasi ini mencakup perbaikan fisik bangunan pasar, penataan kawasan pasar yang sesuai dengan konsep pengembangan kawasan secara umum, kebutuhan masyarakat dan lingkungan, serta sejalan konsep pengembangan Kota Jakarta.
- Menanggapi saran **Fraksi Partai Demokrat** terkait Dewan Kesenian Jakarta dan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM), setiap tahun Eksekutif selalu mengalokasikan anggaran untuk

Dewan Kesenian Jakarta dan berupaya meningkatkan alokasi tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah. Eksekutif juga terus mengoptimalkan revitalisasi dan pengelolaan aset PKJ TIM.

- Terkait dukungan terhadap pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, sebagaimana saran **Fraksi Partai Nasdem** dan **Fraksi PDI Perjuangan**, Eksekutif telah menganggarkan aktivitas pada program pengembangan kebudayaan, pembinaan dan pelatihan pelaku seni, serta pelestarian kebudayaan berbasis digital yang bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI.
- Merespon saran dan pendapat **Fraksi Partai Golkar** serta **Fraksi PDI Perjuangan** terkait upaya penanganan kemacetan lalu lintas, disampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah melakukan:
 1. Pembangunan dan optimalisasi layanan transportasi publik;
 2. Percepatan pekerjaan konstruksi yang berdampak pada pengurangan lebar jalan;

3. Upaya mengurai kemacetan melalui sinergi dengan kepolisian dan pemerintah pusat dalam penanganan manajemen rekayasa lalu lintas.

- Menjawab pertanyaan **Fraksi Golkar** dan **Fraksi PSI** terkait penanggulangan banjir, Eksekutif terus berupaya agar pembangunan *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD) dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.
- Terkait tindak lanjut hasil reses DPRD, sebagaimana saran dari **Fraksi Partai Nasdem**, Eksekutif berkomitmen mengakomodasi hasil reses tersebut dan melakukan monitoring melalui sistem monev, yang selanjutnya akan direalisasikan menggunakan alokasi anggaran tahun berjalan maupun tahun berikutnya.
- Menjawab pertanyaan **Fraksi Partai Golkar** terkait alokasi anggaran dan upaya penanganan kasus kebakaran di DKI Jakarta, Eksekutif telah melakukan mitigasi kebakaran melalui sosialisasi, simulasi dan membentuk Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) di setiap RT, memberikan APAR kepada masyarakat, serta membangun *hydrant* mandiri di kawasan padat hunian, akses sempit, dan area dengan frekuensi kebakaran yang tinggi.

- Menanggapi saran **Fraksi Partai Gerindra** terkait pembangunan menara telekomunikasi atau BTS, Eksekutif telah melakukan pengendalian menara melalui perizinan dengan memperhitungkan keamanan dan keandalan konstruksi. Eksekutif berkomitmen untuk memastikan keberadaan menara tidak menimbulkan permasalahan dengan warga sekitar. Pemilik menara wajib bertanggung jawab atas permasalahan yang timbul dan bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menjawab pernyataan **Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Nasdem, dan Fraksi PSI** terkait percepatan penyelesaian kasus *stunting*, Eksekutif telah melakukan upaya penanganan *stunting* melalui intervensi spesifik dalam seluruh siklus hidup, mulai dari masa remaja, calon pengantin, masa kehamilan, bayi baru lahir, hingga balita.

Upaya penanganan *stunting* pada balita dilakukan melalui pemeriksaan oleh tenaga medis, pemberian makanan tambahan, dan pemantauan gizi dengan melakukan sinergi lintas sektor.

- Menanggapi pertanyaan **Fraksi PDI Perjuangan** terkait Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran kesehatan telah digunakan untuk peningkatan fasilitas kesehatan, pengadaan alat medis, dan pelatihan tenaga kesehatan.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Demikian pokok-pokok penjelasan yang dapat saya sampaikan terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pada kesempatan ini, Eksekutif berharap agar P2APBD tahun anggaran 2023 dapat segera disahkan dan dilanjutkan dengan pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2024. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan semua tahapan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bersama mitra kerja DPRD Provinsi DKI Jakarta. Penguatan kerja sama dan sinergi antara jajaran Eksekutif dan Legislatif merupakan kunci untuk mencapai keberhasilan dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Saya bersama jajaran Eksekutif menyampaikan terima kasih kepada Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan atas perhatian terhadap penjelasan yang telah disampaikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan **Sukses Jakarta untuk Indonesia.**

Sukses Jakarta untuk Indonesia.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Om Shanti Shanti Shanti Om, Namu Buddhaya.

Jakarta, 29 Juli 2024

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Budi Hartono